BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR.... TAHUN
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR .. TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (6), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun... Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor x Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA NOMOR xx TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
5. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

6. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi focus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. pangan;
 - e. infrastruktur;
 - f. energi; dan

- g. jasa industri.
- (3) Skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:
- a. pengurangan pajak daerah;
 - b. pengurangan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Jenis Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bentuk kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- f. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal:
- a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;

2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 6. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 9. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal, Penanam Modal dapat mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 - f. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - h. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (2) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pelindung : Bupati Kutai Kartanegara
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 11. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara

- f. Sekretariat :
1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Unsur Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
 7. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
 8. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten KutaiKartanegara
 9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
 10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam suatu rapat koordinasi.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan penanaman modal jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (5) Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 11

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.

- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau saat akan melakukan perluasan usaha.

BAB VII

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNJAWAB

Pasal 14

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Penanaman Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman wajib :

- a. menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
 - e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
- i. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) DPMPTSP Bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c, Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian;
 - b. Tim Verifikasi dan Penilaian mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - c. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan;
 - d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau

2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 19

PMPTSP melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada bupati secara berkala.

Pasal 20

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap

konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

Pasal 21

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau secara manual jika belum dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.
- (2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB X

SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal
24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada XXXXXX 202X
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Ttd

EDY DAMANSYAH

Diundangkan di Kutai Kartanegara
pada Tanggal xxxxxxxx xxxx xxxx

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO
NIP :